

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Kelurahan Kenanga**

RW 04 Kelurahan Kenanga adalah bagian dari wilayah Kelurahan Kenanga yang berada di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten. Kelurahan Kenanga dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 ini sebanyak 16.533 jiwa. Selain itu Kelurahan Kenanga mempunyai Rukun Warga atau RW sebanyak 6 RW sedangkan untuk Rukun Tetangga atau RT sebanyak 37 RT dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada. Kelurahan Kenanga merupakan suatu Kelurahan hasil pemekaran wilayah dari Kelurahan Gondrong. Dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat Kelurahan Kenanga mempunyai motto dengan nilai – nilai yang ada di dalamnya ialah :

- A : Masyarakat selalu mendapatkan situasi **AMAN** berada di wilayah Kelurahan Kenanga
- S : Kami siap melayani masyarakat dengan perilaku **SOPAN** dan santun
- I : Menjadikan Kelurahan Kenanga selalu **INDAH**, bersih, dan tertata rapih
- K : Dengan ke **KOMPAK** an semua pegawai Kelurahan Kenanga dapat menjadikan *Team Work* yang baik.

Dalam hal ini kelurahan kenanga sendiri memiliki tagline yang mencirikhaskan sekaligus pembeda dari kelurahan lainnya ialah **ASIK** (Aman, Sopan, Indah, Kompak) dengan begitu menjadikan pegawai kelurahan menjalankan tugas berdasarkan motto yang ada untuk melayani masyarakat setempat.

#### **4.1.2 Letak Geografis**

Kecamatan Cipondoh adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Tangerang Provinsi Banten. Dengan luas wilayah sebesar 1.938,1 Ha. Kecamatan Cipondoh terbagi dari 10 kelurahan, salah satunya ialah kelurahan Kenanga dengan luas wilayah 157 Ha yang dijadikan lokasi penelitian peneliti. Secara geografis, Kelurahan Kenanga Kota Tangerang memiliki batas – batas wilayah antara lain :

- a. Batas wilayah sebelah Utara, berbatasan dengan kelurahan Cipondoh Indah
- b. Batas wilayah sebelah Selatan, berbatasan dengan kelurahan Neroktog
- c. Batas wilayah sebelah Timur, berbatasan dengan kelurahan Gondrong
- d. Batas wilayah sebelah Barat, berbatasan dengan kelurahan Cipondoh.

Kelurahan Kenanga merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten. Maka tidak heran apabila masih banyak terdapat sawah atau kebun yang menjadi objek pemandangan untuk masyarakat setempat.

#### **4.1.3 Demografis**

Jumlah penduduk di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang pada tahun 2023 sebanyak 16.553 Jiwa dengan jumlah kepala keluarga 4.947 kepala keluarga. Dari jumlah 16.553 terdapat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki – laki sebanyak 8.386 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 8.167 jiwa, dengan melihat nilai rasio jenis kelamin sebesar 102,3 dalam artian 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki – laki. Maka dari itu jumlah penduduk laki – laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang.

**Tabel 4.1.3.1**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk		Jumlah
Laki – laki	Perempuan	
8.386	8.176	16.553

**Sumber** : *Data Profil Kelurahan Kenanga*

Berdasarkan jumlah penduduk menurut Kelompok Umur (KU) di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang terdapat kelompok angkatan kerja terdiri dari usia 0 – 14 tahun sebanyak 4.407 jiwa, usia produktif sebanyak 11.630 jiwa, dan usia 65 tahun keatas sebanyak 516 jiwa.

**Tabel 4.1.3.2**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
0 – 4	608	582	1.190
5 – 9	845	793	1.638
10 – 14	837	742	1.579
15 – 19	693	658	1.351
20 – 24	659	729	1.384
25 – 29	679	647	1.326
30 – 34	712	707	1.419
35 – 39	662	713	1.375
40 – 44	726	737	1.463
45 – 49	669	640	1.309
50 – 54	503	462	965
55 – 59	351	288	639
60 – 64	196	203	399
65 – 69	199	130	249

70 – 74	58	68	126
>75	64	72	141

**Sumber :** *Data Kependudukan Bersih (DKB) semester 2 tahun 2022*

Berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Kenanga Kota Tangerangan dari jumlah keseluruhan penduduk 16.533 jiwa terdapat 3.304 jiwa yang belum sekolah, 1.777 jiwa belum tamat SD/ sederajat, 1.904 jiwa tamat SD/ sederajat, 2.187 jiwa SLTP/ sederajat, 5.916 jiwa SLTA/ sederajat, 43 jiwa Diploma I/II, 308 jiwa akademik/ diploma III/S.Muda, 1.060 jiwa diploma IV/Strata I, 53 jiwa Strata II, 1 jiwa Strata III.

**Tabel 4.1.3.3**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

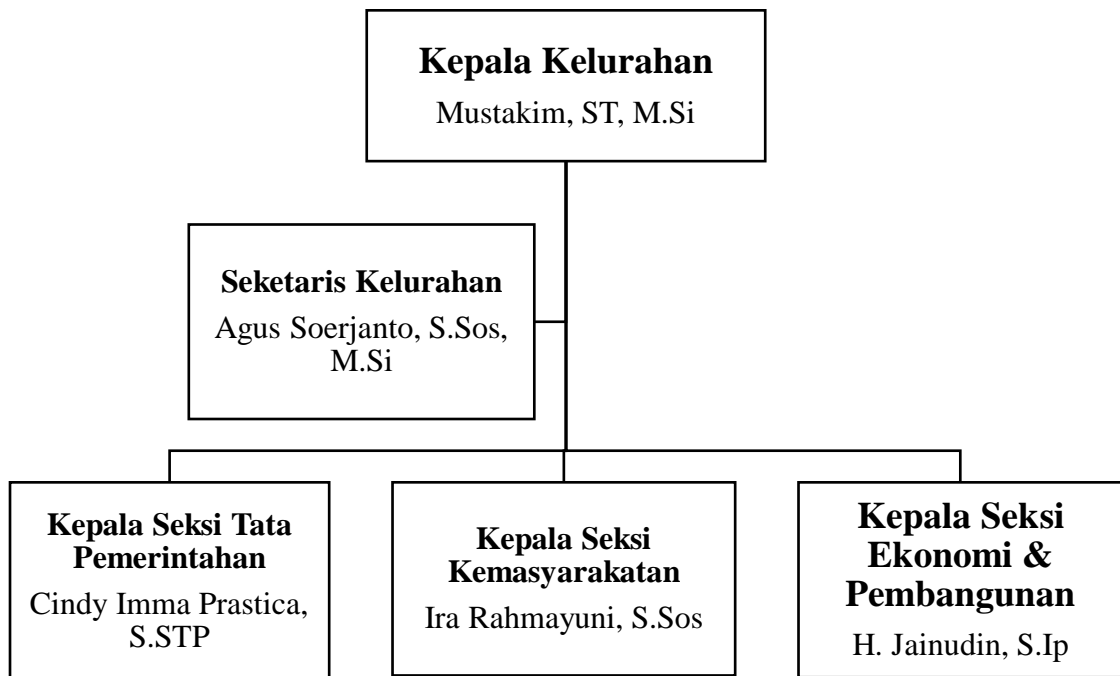
<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Tidak/ belum Sekolah	3.304
Belum Tamat SD/ Sederajat	1.777
Tamat SD/ Sederajat	1.904
SLTP/ Sederajat	2.187
SLTA/ Sederajat	5.916
Diploma I/II	43
Akademi/ Diploma III/ S.Muda	308
Diploma IV/ Strata I	1.060
Strata II	53
Strata III	1

**Sumber :** *Data Kependudukan Bersih (DKB) semester 2 tahun 2022*

#### 4.1.4 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan suatu organisasi diperlukan struktur organisasi tentu saja dalam roda pemerintahan, kelurahan Kenanga dipimpin oleh seorang lurah tentu saja dibantu dengan para perangkat pemerintahan

seperti sekretaris kelurahan, kepala seksi tata pemerintahan, kepala seksi kemasyarakatan, kepala seksi ekonomi dan pembangunan serta lain sebagainya. Adapun struktur kepengurusan Kelurahan Kenanga Kota Tangerang ialah :



**Gambar 4.1.4.1**

Struktur Kepengurusan Kelurahan Kenanga Kota Tangerang

**Sumber :** *Data olah profil Kelurahan Kenanga*

#### **4.1.5 Sarana Pendidikan**

Pendidikan ialah salah satu faktor kebutuhan dasar bagi setiap manusia, sehingga upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan. Dalam hal ini Kelurahan Kenanga Kota Tangerang memiliki sarana pendidikan yang berjumlah 13 buah, terdapat 5 buah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak (TK) terdapat 2 buah TK, sedangkan Sekolah Dasar (SD) terdapat 4 buah yang terdiri 2 buah SD Negeri dan 2 buah SD Swasta. Jumlah sekolah Sekolah

Menengah Pertama (SMP) terdapat 2 buah SMP Swasta. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat 2 buah SMA Swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat 1 buah SMK Swasta.

**Tabel 4.1.5.1**

Jumlah Sarana Pendidikan

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
PAUD	2
TK	2
SD	4
SMP/Sederajat	2
SMA/Sederajat	2
SMK/ Sederajat	1
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>

**Sumber :** *Data olah profil Kelurahan Kenanga*

Dengan banyaknya jumlah sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang diharapkan dapat memicu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya sehingga menciptakan generasi – generasi bangsa yang terdidik. Seiringnya perkembangan zaman yang maju sarana pendidikan di Kelurahan Kenanga diharapkan akan semakin meningkat dapat memberikan ruang pendidikan kepada masyarakat, terlebih Kelurahan Kenanga berada di daerah yang sangat strategis yang berada di Kota Tangerang.

#### **4.1.6 Tempat Ibadah**

Dengan pemeluk agama yang beragam tersedia sarana ibadah untuk memenuhi kebutuhan spritual masyarakat di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang terdapat 30 buah tempat ibadah, tersedia 7 buah masjid, 20 buah mushola, 2 buah gereja, dan 1 buah vihara. Dengan demikian

tersedianya sarana ibadah masyarakat dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing – masing.

**Tabel 4.1.6.1**

Jumlah Tempat Ibadah

<b>Sarana Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
Masjid	7
Mushola	20
Gereja	2
Vihara	1
<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>

**Sumber :** *Data olah profil Kelurahan Kenanga*

**4.1.7 Sarana Kesehatan**

Berdasarkan banyaknya jumlah masyarakat di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang didukung dengan adanya sarana kesehatan untuk masyarakat dapat memeriksakan kesehatannya. Kelurahan Kenanga mempunyai 9 posyandu yang 2 sudah dibangun oleh pemerintah daerah, 15 orang tenaga medis, 22 orang bidan, 45 orang kader posyandu, dan 1 orang apoteker. Dalam hal ini masyarakat dapat menjamin kesehatannya berdasarkan sarana yang tersedia di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang.

**Tabel 4.1.7.1**

Jumlah Sarana Kesehatan

<b>Sarana Kesehatan</b>	<b>Jumlah</b>
Posyandu	9 buah
Tenaga Medis	15 orang
Bidan	22 orang
Kader Posyandu	45 orang
Apoteker	1 orang

**Sumber :** *Data Kependudukan Bersih (DKB) semester 2 tahun 2022*

## 4.2 Hasil Penelitian

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program penanggulangan kemiskinan yang berupa pemberian bantuan sosial secara tunai bersifat bersyarat kepada keluarga miskin yang dimana telah ditetapkan sebagai penerima atau peserta PKH. Tujuan utama dari adanya PKH ini ialah mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat keluar dari ketidak berdayaan. Tentu saja keluarga miskin penerima PKH diharuskan memenuhi salah satu persyaratan yang terkait dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, karena sekarang ini terdapat tiga komponen PKH yakni komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial.

Para penerima bantuan PKH merupakan orang – orang atau keluarga yang kurang mampu sehingga membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah untuk dapat memenuhi minimal kebutuhan dasarnya terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bahwa penerima PKH harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara keseluruhan nama – nama yang ada di Kartu Keluarga, tidak dapat hanya salah satu nama saja yang terdaftar di dalam DTKS.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kenanga secara jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahunnya meningkat bahkan setiap bulan banyak nama – nama yang baru itu berdasarkan usulan – usulan sehingga terjadi peningkatan jumlah penerima PKH. Sekarang ini nama – nama usulan itu berasal dari bawah tingkat RT yang nantinya operator kelurahan yang menentukan awal kesesuaian keadaan terkini, lalu akan disampaikan kepada walikota untuk di Surat Keputusan (SK) kan sebagai daftar nama usulan yang diberikan ke pusat sebagai penerima PKH, tetapi keputusan sebagai penerima PKH itu dilakukan oleh pusat dan dikeluarkan melalui surat keputusan direktoral jaminan sosial keluarga.



Setelah itu nama – nama yang diusulkan telah menjadi penerima PKH sudah di Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) akan di cek kembali atau divalidasi oleh pendamping sosial PKH melalui Ketua Kelompok saat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) berlangsung menanyakan keberadaan nama – nama usulan tersebut apakah ada atau tidak sesuai alamat yang tertera. Adanya perubahan sistem sekarang ini membuat pendamping melakukan validasi KPM ketika mereka sudah dikatakan penerima PKH terlebih dahulu, tidak berdasarkan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA) untuk calon KPM hal ini karena adanya perubahan dari kebijakan pemerintah pusat. Sehingga membuat ketidak bakuan sistem yang ada dengan pedoman pelaksanaan PKH yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia serta di lapangannya membuat pendamping harus lebih sigap dengan pembaruan – pembaruan yang ada dalam pelaksanaan PKH.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan hasil dari pengumpulan data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang telah ditentukan, observasi, dan dokumentasi karena peneliti menggunakan metode kualitatif.

#### **4.2.1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Kenanga**

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tersebut, terdapat komponen program dalam model logika. Model logika merupakan alat yang membantu seseorang untuk melihat hubungan antara beberapa komponen program. Menurut Rist and Kusek (2004) komponen model logika pada program sebagai berikut :

##### **A. *Input***

*Input* ialah sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan seperti sumber daya keuangan, manusia dan material yang digunakan

dalam pelaksanaan hal yang penting. Sehingga dalam hal ini harus tersedia sebagai modal awal suatu program tersebut. Dalam hal ini pelaksanaan input dari PKH dalam hal ini dilihat dari faktor sumber daya, anggaran, dan material.

Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah tertentu dipercaya mampu menentukan optimalnya pelaksanaan kebijakan, selain itu juga kompetensi serta kemampuan SDM juga turut menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kebijakan. Dalam hal ini SDM pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenaga Kota Tangerang merupakan hal utama dalam suatu program. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Affita sebagai Pendamping PKH Kelurahan Kenaga, ialah :

*“Iya pihak – pihak yang terlibat kalo dari struktur tingkatan kota ya pelaksanaannya ada KORKOT atau Koordinator Kota/Kab terus turun ke bawah tingkat kecamatan itu ada pendamping sosial PKH ya cuman itu kalo struktur secara kementerian pendamping ya se kota, dulu ada itu namanya APD operator gitu sekarang sudah gak ada mba. Kalo pendamping se kecamatan Cipondoh itu memang ada 5 orang kerena penugasan sesuai domisili sekarang mba.”*

Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sumber pendanaan ini telah diatur dalam PERMENSOS 01 Tahun 2018 menyebutkan bahwa bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko. Sebagaimana hal yang disampaikan oleh Pak Syepepi sebagai Koordinator Kota Tangerang, ialah :

*“Sebenarnya adanya PKH sangat penting karena sekarang aja bantuan digelontorkan tiap tahunnya banyak jumlahnya di Kota Tangerang jadi menurut saya uang yang bergulir itu bisa diputarkan lagi kan orang yang mendapatkan bantuan kan buat belanja lagi akhirnya ekonomi berputar disini perekonomian meningkat sangat. Tentu juga besaran jumlah bantuan yang didapat tiap KPM berbeda – beda berdasarkan komponen yang dimilikinya mba.”*

Selain itu pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenaga berdasarkan pedoman pelaksanaan yang telah diatur Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah peraturan yang mengatur pedoman pelaksanaan PKH di Indonesia. Sebagaimana hal yang disampaikan oleh Pak Syepe sebagai Koordinator Kota Tangerang, ialah :

*“Nah kalo sekarang itu justru semua ini basis data ini kan ada di PUSDATIN jadi disaringnya itu langsung dari PUSDATIN, kemudian tanpa sepengetahuan pendamping PKH jadi dia (KPM) dapat bantuan dulu baru kita tau oh ini dia KPM PKH berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru lah pendamping turun kelapangan ngasih tau kalo namanya ada berdasarkan SP2D bank terus kartunya belum ada (KKS). Selain itu ada yang baru jadi ga mesti PKH itu punya kartu merah putih dan itu masuk bantuannya lewat kantor POS mba. Nantinya saat kegiatan P2K2 biasanya dibarengin sosialisasi buat yang baru dapat bantuan, apapun informasi PKH itu disampein di P2K2 itu.”*

## **B. Process**

Process ialah kegiatan apa saja yang telah direncanakan yang kemudian dilaksanakan oleh sumber daya yang ada dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) telah diatur dalam pedoman terkait kegiatan apa saja yang ada dalam PKH. Proses Pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

### **1. Perencanaan**

Dalam hal dilakukan untuk menentukan terkait lokasi dan jumlah calon peneriman manfaat atau KPM. Tentu saja lokasi dan jumlah calon KPM berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan pada korban bencana alam, bencana sosial, dan komunitas adat terpencil (KAT). Dalam penentuan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI yang berhak menentukan berdasarkan hasil pengisian data KPM.

Pada tahap ini menyajikan terkait data apa saja yang diperlukan sebelum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Syepey sebagai Koordinator Kota Tangerang, ialah :

*“Dan adanya tim koordinasi kalo pendamping itu kecamatan sebutannya contohnya di cipondoh pendampingnya ada 5 orang, sedangkan kelurahan ada 10 kelurahan jadi ada yang 1 orang 2 mungkin juga 1 orang ada yang 1 apabila diwilayah tersebut KPM nya gendut gitu banyak jadi tergantung kondisional aja. Memang kita kekurangan SDM saat ini ada 60 ya mba ya se Kota Tangerang, sebetulnya ini kekurangan mba sedangkan kelurahan aja jumlahnya ada 104 kelurahan belum lagi ada kelurahan gendut ada kelurahan kurus gitu.”*

Penentuan jumlah calon KPM berdasarkan DTKS, tetapi sekarang semua anggota keluarga dalam satu kartu keluarga harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu untuk bisa menjadi jumlah calon nama – nama KPM. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Affita sebagai Pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Iya sudah mba Anggun, PKH ini untuk masyarakat miskin dimana ada 3 komponen itu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Setelah mereka namanya tercantum di DTKS semua nama – nama yang ada di Kartu Keluarga sudah tercantum baru bisa jadi penerima PKH, kalo hanya salah satu saja itu gak bisa mba jadi harus semuanya tercantum.”*

## **2. Pertemuan Awal dan Validasi**

Setelah tahapan perencanaan selesai, pendampingan sosial PKH melakukan sosialisasi pada tahapan ini pertemuan awal pada calon KPM PKH agar memiliki pemahaman tentang PKH serta kesiapan sebagai periman manfaat PKH. Sedangkan kegiatan validasi dilaksanakan pada calon KPM yang diundang tetapi tidak menghadiri pertemuan awal, maka akan dilakukan validasi dengan cara kunjungan kerumah oleh pendamping sosial PKH dan menandatangani fomulir validasi. Selain itu dilakukan kelengkapan

data pembukaan rekening Bank, agar KPM PKH dapat mengakses perbankan dalam penyaluran bantuan sosial maka data KPM PKH hasil validasi harus sesuai persyaratan minimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dewi selaku KPM PKH sejak awal tahun 2015 dan Ketua Kelompok di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Iya tadi yang saya bilang dek awalnya kita dapet undangan dari bank buat dateng ke kelurahan dikumpulin gitu dek yang dapet undangan, kita bawa KTP dan kartu keluarga itu buat pencocokan data dari pusat datanya sama atau gak pendamping yang cocokin.*”

Hal yang sama disampaikan Ibu Kokomariah selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga sejak awal tahun 2015, ialah :

*“Pas saya awalnya itu ya dulu dapet undangan buat dateng ke kelurahan gitu neng. Terus pas dikelurahan langsung dikasih tahu kalau saya dapet bantuan PKH mereka dapat data nya dari pusat katanya yang dapet bantuan PKH ini dek dan di cocokin datanya sama pendamping.”*

Dilanjutkan hal yang sama oleh Ibu Dahlia selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga sejak tahun 2017, ialah :

*“Jadi pas saya dapet undangan buat dateng ke kelurahan itu dikasih tau tuh bakalan dapet PKH nantinya, pas dikelurahan dicocokin data yang ada dipendamping sama data KTP dan kartu keluarga saya dek sekalian dijelasin juga bantuan PKH ini hak sama kewajibannya sebagai KPM nya apa saja gitu sih dek. Terus juga dikasih tau saya penerima bantuan pendidikan karena saya punya anak sekolah gitu dek.”*

Bahwa terdapat perubahan pada sekarang ini perihal tahapan pertemuan awal dan validasi data dalam pelaksanaan PKH. Tidak adanya peretemuan awal saat ini dalam pelaksanaannya, berdasarkan sistem sekarang yang menentukannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Syapei selaku koordinator Kota Tangerang, ialah :

*“Kalo sekarang validasinya itu langsung dari PUSDATIN jadi pengecekan itu nanti tinggal jawab biasanya ada yang sudah pindah orangnya dan lainnya. Pedoman sekarang sudah tidak digunakan yang saya bilang itu dinamis lagi lagi mba berubah jadi sistem sekarang makenya bukan pedoman lagi, untuk pedoman pelaksanaan terbaru gak ada.”*

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Affita selaku pendamping PKH kelurahan Kenanga, ialah :

*“Kalo dulu iya ada pertemuan awal buat calon penerima PKH mba Anggun, kalo sekarang kita ada pertemuan awal ketika mereka sudah dapet PKH mba. Pertemuannya sekarang dilakukan pas saat kegiatan P2K2 setiap bulan dan tiap bantuan turun tiap tahapnya itu ada nama – nama baru nah saya tanyakan ke ketua kelompok biasanya nama – nama yang baru itu mba, nah dipertemuan P2K2 itu baru lah mereka yang baru kita kasih penjelasan tentang PKH baik kewajiban dan haknya mba Anggun. Ya karena sekarang berubah baru mulai tahun kemarin, sosialisasinya pas mereka tau – tau udah dapet bantuan bukan sebelum dapet bantuan mba.”*

### **3. Penetapan KPM PKH**

Pada tahapan ini Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data KPM PKH existing atau hasil pemuktahiran data dan data berdasarkan validasi calon KPM PKH yang sesuai kriteria keperertaan PKH. Penetapan KPM PKH tentu saja ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bukan berdasarkan pendamping sosial PKH. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Affita selaku pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Sekarang ini pendamping tidak tau penetapan KPM kita taunya dari SP2D itu mba dari pusat gitu. Sebenarnya sih dulu sudah bagus tahapannya jadi sebelumnya penentuan menjadi penerima PKH kan kita lakukan verifikasi dan validasi dulu memastikan dulu, kalo yang sekarang ini kekurangannya gini udah ditentukan nih udah turun langsung udah ter SP2D kan ternyata pas kita pastiin di bawah pada nda ada semua KPM nya yang penerima*

*itu, saya croscek pas pertemuan kelompokan berdasarkan data di SP2D itu kadang ada aja yang keselip gitu, ada yang sudah gak tinggal di kelurahan kenanga atau ketua kelompok gak tau yang namanya ini tinggalnya dimana gitu mba.”*

Hal yang sama disampaikan oleh Pak Syapei selaku Koordinator PKH Kota Tangerang, ialah :

*“Nah kalo sekarang itu justru semua ini basis data ini dari di PUSDATIN jadi disaringnya itu langsung dari PUSDATIN, kemudian tanpa sepengetahuan pendamping PKH jadi dia (KPM) dapet bantuan dulu baru kita tau oh ini dia KPM PKH berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru lah pendamping turun kelapangan ngasih tau kalo namanya ada berdasarkan SP2D bank terus kartunya belum ada (KKS). Selain itu ada yang baru jadi ga mesti PKH itu punya kartu merah putih dan itu masuk bantuannya lewat kantor POS mba.”*

#### **4. Penyaluran Bantuan Sosial**

Dalam tahapan ini penyaluran bantuan sosial untuk penerima manfaat PKH yang telah ditetapkan memiliki komponen kepesertaan, dilaksanakan secara bertahap tidak sekaligus turun berdasarkan jumlah besaran, namun dalam satu tahun anggaran berjalan sesuai skema penyaluran bantuan sosial yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Selain itu penyaluran bantuan PKH melalui sistem dimana harus dicairkan terlebih dahulu melalui Kartu Keluarga Sejahterah (KKS) atau buku tabungan pembukaan rekening yang telah ditentukan. Namun di Kelurahan Kenanga pada tahun ini bahwa di penyaluran bantuan sosial berbeda dari pedoman pelaksanaan yang ada. Seperti pernyataan dari Ibu Affita selaku pendamping PKH Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Kalo penyaluran bantuan itu nanti kan setiap tahapnya kita dikasih tau dari pusat yang ter SP2D kan dan juga ada yang tidak ter SP2D kan langsung gak harus punya KKS bantuannya masuk*

*lewat kantor POS berdasarkan undangan dari kantor pos kali ini.”*

Lebih lanjut Ibu Affita menambahkan ialah :

*“Ya gak bisa ditentukan baku ya pendampingan atau mekanisme alur bansos PKH sekarang itu tidak bisa dipastikan karena berubah – rubah tiap tahunnya mba Anggun dari pusatnya.”*

Selain itu bantuan sosial yang diperoleh peserta PKH harus dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha, dan kebutuhan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan dari PKH menjadikan masyarakat yang berdaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Affita selaku pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Iya mereka manfaatkan bantuan dari PKH tergantung dari komponen masing – masing mba, kayak mereka memfokuskan pendidikan dan kesehatan mba. Kalo buat modal usaha rata – rata ngga ya mba Anggun karena mereka emang lebih ke pendidikan dan kesehatan aja gak cukup kalo buat modal usaha mba. Kalo untuk kebutuhan sehari – hari mereka kan dapat bantuan BPNT per dua bulan sekali kayak beras, telur, buah tapi gak semua penerima PKH dapat BPNT mba, kalo yang awal sih iya tahun 2015 itu memang wajib jadi mereka dapat PKH otomatis dapat BPNT juga, kalo sekarang nda dapat BPNT yang baru ya mba.”*

Hal yang serupa disampaikan oleh KPM Kelurahan Kenanga Bu Dewi sekaligus ketua kelompok PKH sejak tahun 2015, ialah :

*“Kalau saya manfaatin bantuan yang didapet ya untuk keperluan sekolah anak saya, lumayan juga kan biaya anak sekolah dek belum lagi ongkosnya. Kalau dibilang ada sisa atau ngga dari uang PKH iya gak ada dek, kalau sesekali misal ada sisa juga pasti buat kebutuhan sehari – hari buat makan aja sih dek. Kalau buat diputer bantuanya ya gak bisa karena emang buat sekolah palingan buat belanja sehari – hari.”*

Pernyataan itu diperkuat oleh Ibu Kokomariah selaku KPM PKH sejak 2015, ialah :



*“Iya saya memanfaatkan bantuan PKH yang saya dapat pas dulu dapat untuk pendidikan anak sekolah neng , emang saya fokusin buat anak sekolah bayaran SPP, ongkos, seragam, sepatu, belum lagi buat beli kebutuhan sekolah lainnya yang kadang ada aja yang harus dibeli buat keperluan sekolah. Kalaupun ada sisa dari duit bantuan yang cair ya saya buat keperluan makan hari – harinya neng. “*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dahlia selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga sejak 2017, ialah :

*“Bantuan yang saya dapat ya buat kebutuhan anak sekolah saya kayak keperluan dia juga tas seragam sepatu kalau bayaran sekolah gratis sebab anak saya kan masuk ke SD Negeri. Ya walaupun gak bayaran juga buat kebutuhan lain – lainnya tapi buat emangkan buat kebutuhan dia (anak) juga gitu. Bantuan setiap cair pasti bisa kayak kebutulan pas lagi kita butuhin buat beli keperluan sekolah, kalau ada sisa disimpan ya fokus buat urusan sekolah juga diutamainnya dek.”*

## **5. Pemutakhiran Data**

Pada tahapan ini tujuan dari pemutakhiran data ialah untuk memperoleh kondisi terkini dari anggota KPM PKH. Nantinya data digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial khususnya PKH, dan digunakan untuk verifikasi penyaluran dan pemberhentian bantuan yang diperoleh. Hasil pemutakhiran data melalui e-PKH akan dikirimkan kepada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial yang dilakukan oleh pendamping setiap terjadi perubahan kondisi KPM. Pada pelaksanaannya di kelurahan Kenanga terjadinya perubahan dalam pemutakhiran sebagaimana dari pernyataan Ibu Affita selaku pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Kalo sekarang ya itu mba melalui SIKS-NG mba yang link langsung ke dapodik dan dukcapil, bukan lewat e-PKH lagi sekarang mba. Beda kalo dulu itu kita berdasarkan real kita per 3 bulan pemutakhiran komponen dalem keluarga atau ada KPM yang pindah, KPM meninggal, dan KPM tidak ditemukan. Kalo*

*sekarang udah meninggal pun kalo udah dilaporkan ke dukcapil otomatis bantuannya nol mba.”*

Lebih lanjut Ibu Affita menambahkan, ialah :

*“Jadi dengan sistem baru harus pendampingan intens serta berdasarkan laporan – laporan yang ada buat tau, misalnya apakah penerima bantuan yang udah meninggal lapor ke dukcapil karena kan kalo udah meninggal tidak lagi mendapatkan bantuan harusnya, paling gak harus lapor ke pendamping agar memverifikasi bisa merubah status pemutakhirannya gitu kan di SIKS-NG meninggal gitu saja.”*

## **6. Verifikasi Komitmen**

Pada tahapan ini merupakan fokus penelitian peneliti berdasarkan terdapat permasalahan di lapangan yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan observasi awal serta keluhan dari masyarakat. Tentu saja kegiatan verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir, dan mengakses fasilitas secara rutin baik kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Untuk pemenuhan kewajiban itu pelaksana PKH harus memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir, dan mengakses layanan yang sesuai komponen yang didapatnya. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Affita selaku pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Verifikasi komitmen itu kan ada tiga ya verkom pendidikan, verkom kesehatan, dan verkom kesejahteraan sosial ya nah itu biasanya pendampingan kita lakukan verifikasi komitmen melalui koordinasi dengan pihak sekolah kita melihat progres anak – anak ini rajin sekolah kah kalo pendidikan ya mba. Kalo kesehatan kita koordinasi langsung ke UPT kesehatannya langsung gitu mba ke pukesmas dan posyandu biasanya.”*

Namun sekarang ini adanya perubahan sistem pelaksanaan yang dilakukan dalam verifikasi komitmen. Hal tersebut lebih lanjut ditambahkan oleh Ibu Affita, ialah :

*“Jadi sekarang otomatis dari pusat terkait KPM yang menjalankan kewajiban dan pemanfaatan fasilitas layanan itu ketauan mba sistemnya ngelink. Sekarang udah gampang keditek sih mba kalo misalkan anak ini bolos sekolah terus dikeluarkan sekolah ya misalkan, itu sudah langsung dapodiknya gak sinkron otomatis gak keluar bantuannya dan tentu kita disuruh croscek liat kondisi realnya gitu. Jadi kayak gitu udah sistem sekarang emang mba.”*

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Dewi selaku KPM PKH sekaligus sebagai ketua kelompok di Kelurahan Kenanga dalam pelaksanaan komitmen dari bantuan PKH yang diperolehnya, ialah :

*“Saya menjalankan kewajiban saya sesuai dengan komponen yang saya dapet itu pendidikan ya dek, kayak mengecek absen sekolah buat rajin sekolahnya dan mengingatkan ke anak saya untuk belajar dengan bener menjaga nilai nya agar tetap bagus gitu sih dek. Kadang juga dimintain kayak nilai raportnya buat diliat jalani kewajiban.”*

Hal serupa disampaikan juga oleh Ibu Dahlia selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Alhamdulillah udah menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH karena saya komponen pendidikan anak saya nilainya bagus alhamdulillah selalu masuk sekolah dan belajar.”*

Selain itu disampaikan juga oleh Ibu Kokomariah selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga yang bantuan PKH nya tidak keluar sejak tahun lalu, ialah :

*“Iya saya menjalankan kewajiban penerima PKH komponen pendidikan salalu ngasih tau ke anak buat rajin masuk sekolahnya belajar yang bener gitu sih neng.”*

## **7. Pendampingan**

Pada tahapan ini adanya pendampingan untuk KPM PKH diperlukan dalam mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH ialah menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait

pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu pendampingan terhadap kelompok KPM PKH dapat dilakukan melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) oleh pendamping sosial PKH. Dalam hal ini pendampingan yang dilakukan di kelurahan kenanga oleh pendamping. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Affita selaku pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Kalo saya pendampingan intens mba tidak putus – putus baik itu di pertemuan kelompok P2K2 maupun home visit gitu aja kalo saya, tapi kalo lebih kesejahteraan sosialnya Peningkatan ekonomi ini akan dicoba untuk merubah mindset dari si KPM bahwa si KPM ini tidak harus melulu hanya mengharapkan bantuan dari PKH tetapi kalo bisa mempergunakan dan menyisihkan bantuan itu untuk modal usaha selain ada bentuk kolaborasi dari pemda terkait pembinaan usaha gitu. Saya sih sebetulnya kepingin banget gitu loh coba menginisiasi kayak kolaborasi dengan mungkin pihak swasta atau pihak lain gitu untuk mereka minimal ya modal dan pemasaran, cuman ya gitu belum ada jalan gitu saya mba karena masyarakat sama pihak pihak itu melihat KPM hanya menerima bantuan aja gitu loh belum ada yang buat kesejahteraan sosialnya secara khusus buat usaha berkelanjutan diwilayah saya loh ya mba Anggun.”*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dewi selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Saya kebetulan ditunjuk sebagai ketua kelompok sudah jelas neng ikutin kegiatan terus pertemuan kelompok, kalau diadakanya itu kadang rinci ya kadang ya paling ngga 3 bulan sekali ya karena kalau 1 bulan gak kekejar jadi gantian gitu dek. Kegiatan yang diadakan berdasarkan modul yang ada dari dinsos nanti pendamping yang jelasin ke KPM perkelompok gitu dek kemarin terakhir itu masalah stunting dek karena di PKH kan ada ibu hamil dan balita. Sebagai penilaian juga dalam pertemuan kelompok ini bagian dari kewajiban KPM penerima PKH dek.”*

Diperkuat pernyataan dari Ibu Dahlia selaku KPM PKH yang sebelumnya status kepesertanya tidak keluar bantuannya dan sekarang sudah dapat bantuannya lagi, ialah :

*“Iya selama saya masih dapet ya rajin saya hadir pertemuan kelompok, pas kemarin 2 tahun gak dapet jujur aja sih saya ga mengikuti kegiatan – kegiatan yang diadakan karena kata Bu Dewi (ketua kelompok) gak dateng ya gak apa – apa , tapi sebelumnya saya sebisa mungkin mengikuti sih kalau lagi gak bisa yang ga ikutan kegiatan yang ada izin dulu gitu. Dan sekarang kan bantuan saya alhamdulillah dapet lagi ya saya itu mengikuti kegiatan pertemuan kelompok yang menjadi kewajiban kita, karena nambah ilmu juga kan kita dari kegiatan yang diadakan kayak cara pengelolaan uang yang baik dan benar.”*

Selain itu pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang pada tahapan pendampingan, ditemukan hasil penelitian bahwa pendamping PKH melakukan pendampingan kepada KPM PKH yang mengalami permasalahan pada status kepesertaan PKH diberhentikan secara langsung tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada KPM. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Kokomariah selaku KPM PKH yang status kepesertanya diberhentikan, ialah :

*“..... bu Affita itu orangnya cepet dan baik neng kayak saya ngasih tau kedia kalau bantuan saya gak cair – cair sama dia langsung dicari tau kenapa bisa gak cair penyebabnya apa gitu neng, ternyata pas di cek taunya saya diputus bantuannya sama pemerintah daerah padahal semua berkas aman gak ada yang salah. Sekarang sih lagi diurusin bu Affita lagi dicari tau lagi gimana biar bisa dapet lagi katanya gitu neng.”*

## **8. Transformasi Kepesertaan**

Pada tahapan ini adanya batasan waktu dalam kepesertaan perimaan bantuan PKH yaitu selam enam tahun, setelah itu sangat diharapkan adanya perubahan perilaku terhadap KPM PKH dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial serad adanya peningkatan status sosial ekonomi. Transformasi kepesertaan meerupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui

kegiatan resertifikasi, hasilnya akan digunakan untuk menetapkan status akhir kepersetaan PKH yaitu graduasi atau transisi. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Affita selaku pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Kalo sekarang secara graduasi mandiri masih banyak yang keberatan disini mba, mungkin transformasi dari tidak ada komponen jadi misalnya sudah tidak ada komponen PKH nya otomatis kan mereka sudah tidak dapat PKH. Terus ya itu mba sama verifikasi ke tidak layak lain gitu entah dari kita pendamping atau PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) yang lain. Sebetulnya ada target graduasi mba tahun kemarin harusnya saya 5% dari jumlah KPM tapi saya gak bisa, diminta sama dinsos aja 1 tahun buat pendampingan usaha gak kirim saya gak berani karena ini masih ketakutan kalo dihapus mereka bener – bener belum mandiri gitu loh mba jadi masih bergantung istilahnya penghasilan mereka rata – rata masih di bawah UMR. Jadi kalo misalkan mau graduasi mampu itu kita masih mikir – mikir banyak pertimbangan ya lah. Kalo graduasi mandiri jarang ada kalo gak diteken, tapi tahun 2019 itu banyak yang mengunduri diri karena ketakutan labelisasi rumah stiker sebagai penerima PKH.”*

### **C. Output**

*Output* ialah mencakup jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan program atau kebijakan seperti sekelompok orang atau organisasi yang telah dilaksanakan. Tentu yang merasakan efek langsung dari PKH adalah masyarakat miskin yang telah memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang dalam hal ini memfokuskan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut.

Bantuan yang diterima oleh KPM PKH umumnya berdasarkan pada komponen dalam satu keluarga tersebut, yang telah diatur pada pedoman pelaksanaan PKH. Dengan demikian nominal yang diterima oleh KPM tidaklah terlalu besar, sehingga hanya digunakan dalam jangka pendek seperti halnya untuk pemenuhan kebutuhan yang lebih

mendesak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Affita selaku pendamping PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Iya mereka memanfaatkan bantuan dari PKH tergantung dari komponen masing – masing mba, kayak mereka memfokuskan pendidikan dan kesehatan mba. Kalo buat modal usaha rata – rata ngga ya mba Anggun karena mereka emang lebih ke pendidikan dan kesehatan aja gak cukup kalo buat modal usaha mba. Kalo untuk kebutuhan sehari – hari mereka kan dapet bantuan BPNT per dua bulan sekali kayak beras, telur, buah tapi gak semua penerima PKH dapet BPNT mba, kalo yang awal sih iya tahun 2015 itu memang wajib jadi mereka dapet PKH otomatis dapet BPNT juga, kalo sekarang nda dapet BPNT yang baru ya mba.”*

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan adanya bantuan sosial PKH mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan kepemilikan komponen yang dimiliki untuk keperluan keluarga, dimana KPM sebelum mendapatkan bantuan sosial PKH hanya memiliki penghasilan dari hasil kerja suami saja atau sebaliknya. Oleh karena itu KPM merasakan adanya perubahan dalam keluarganya mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. Berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Dewi selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Penghasilan keluarga saya kecil neng ga sampe 2 juta, ya kalo diitung rata – rata 1,5 juta perbulan neng alhamdulillah bisa buat makan sehari – hari neng. Iya neng alhamdulillah membantu yang jelas buat anak sekolah neng saya bisa mensekolahkan anak saya dari anak saya yang pertama sampe sekarang ini anak ketiga baru mau masuk SMA. Dulu waktu anak saya yang pertama asal mau ulangan ngadep dulu ke sekolah, kalau sekarang alhamdulillah neng saya bisa sekolahin anak saya dari PKH ini walaupun ga semuanya terpenuhi lumayan terbantulah neng buat anak sekolah, pas ada PKH kan alhamduliillah terbantu buat bayaran ulangan. Kalau buat diputer bantuannya ya gak bisa karena emang buat sekolah palingan buat belanja sehari – hari.”*

Hal yang serupa diperkuat pernyataan dari Ibu Dahlia selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Ya kalo penghasilan suami pas buat kebutuhan banget dek suami saya penjahit baju gitu ya saya bersyukur aja masih bisa buat kebutuhan makan gitu dek, ya gitu penghasilan kita kecil dek. Saya sendiri guru ngaji dek biasanya pada ngaji ini ya anak – anak gak banyak – banyak. Ya beda sih sebelumnya ya ada kurangnya ini itu kalau setelahnya ya dari kekurangan itu ketutup walaupun gak semuanya ketutup cukup bersyukur dek. Misal itu ya dapet mensekolahkan anak saya keperluan sekolah bisa terbantu seperti beli seragam sekolah kalau sudah kekecilan bisa langsung beli pake uang dari bantuan PKH ini walaupun gak sepenuhnya ya dek.”*

Selain itu juga pernyataan dari Ibu Kokomariah selaku KPM PKH yang bantuannya diberhentikan menyatakan, ialah :

*“ Penghasilan suami saya tidak tentu dek , saya sendiri jualan kecil-kecilan jajanan gitu kayak ciki – ciki untungnya ga seberapa, malahan anak saya yang kecil suka ambil jajanan di jualan saya dek. Suami saya sekarang pengangguran karena gapunya lapak jualan dipasar buat jualan bibit lele, penghasilan sekitar 1 juta sampe 1,5 juta sih dek alhamdulillah saya syukurin aja. Kalau sebelumnya itu saya sempet mikirin anak saya bisa sekolah apa ngga ya, soalnya anak saya ada 4 neng ditambah penghasilannya kurang saya. .... Pas saya dapet PKH itu sangat – sangat membantu saya khususnya pendidikan anak sekolah neng ,apalagi swasta bayaran kan neng anak saya. Tapi sekarang ini pas dimana saya lagi butuh buat bayaran anak masuk sekolah SMK malah gak turun bantuan malah saya diberentikan, pusing juga mikirnya neng belum buat makan sehari – harinya neng.”*

Selain itu PKH juga memiliki kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti oleh KPM diantaranya Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Tentu saja kegiatan – kegiatan difasilitasi langsung oleh para pendamping PKH setelah proses penyaluran bantuan kepada KPM. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pak Syapei selaku Koordinator PKH Kota Tangerang:

*“PKH kita ada yang namanya P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) di dalam materi P2K2 ini ada materi yang harus disampaikan ke KPM yang sesuai dengan kurikulum yang*



*ditetapkan kalau anak sekolah seperti pengasuhan dan pendidikan anak, gizi, stunting, lansia jadi banyak macam – macamnya dan itu harus disampaikan terus kepada pendamping dan KPM. Nah dalam hal ini tugas daripada pendamping itu menyampaikan itu.”*

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Dewi selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Kegiatan yang diadakan berdasarkan modul yang ada dari dingsos nanti pendamping yang jelasin ke KPM perkelompok gitu dek kemarin terakhir itu masalah stunting dek karena di PKH kan ada ibu hamil dan balita. Sebagai penilaian juga dalam pertemuan kelompok ini bagian dari kewajiban KPM penerima PKH dek. Kalau kegiatan selain P2K2 saya aktif dimasyarakat sebagai kader juga dek posyandu balita dan lansia, sama ada pengajian ibu – ibu gitu seminggu sekali saya ikutin.”*

Hal ini diperkuat pernyataan dari Ibu Kokomariah selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Iya saya ikutin setiap kegiatan pertemuan kelompok yang diadakan sama ketua kelompok dan pendamping PKH, setiap bu dewi (ketua kelompok) ngasih tau pasti ikutin kita sempet – sempetin dateng ke kelurahan , karena banyak ilmu yang diajarin jadi kita paham kayak cara membuat makanan atau kue – kue gitu buat jualan. Selain itu kita setiap pertemuan ini dijelasin dan dibimbing bener – bener kalo kita ada kendala misalnya kita mau urus apa gitu gak tau caranya diajarin neng.”*

#### **D. Outcomes**

*Outcomes*, ialah menekankan terhadap dampak atau manfaat program jangka pendek dan menengah dari program atau kebijakan yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang dampak yang diharapkan dalam PKH adalah KPM dapat merasakan manfaat dari adanya PKH. Dalam bidang pendidikan, terbantunya dalam meringankan beban pengeluaran mereka untuk kebutuhan anak sekolah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dewi selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“Kalau saya manfaatin bantuan yang didapet ya untuk keperluan sekolah anak saya, lumayan juga kan biaya anak sekolah dek belum lagi ongkosnya. Kalo kurang sehat yang kita periksa ke posyandu kalo gak ya pukesma untuk kesehatan dek.”*

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Dahlia selaku KPM PKH di Kelurahan Kenanga, ialah :

*“.....Ya beda sih sebelumnya ya ada kurangnya ini itu kalau setelahnya ya dari kekurangan itu ketutup walaupun gak semuanya ketutup cukup bersyukur dek. Misal itu ya dapet mensekolahkan anak saya keperluan sekolah bisa terbantu seperti beli seragam sekolah kalau sudah kekecilan bisa langsung beli pake uang dari bantuan PKH ini walaupun gak sepenuhnya ya dek. Bantuan yang saya dapat ya buat kebutuhan anak sekolah saya kayak keperluan dia juga tas seragam sepatu kalau bayaran sekolah gratis sebab anak saya kan masuk ke SD Negeri.”*

Selain itu diperkuat juga pernyataan dari Ibu Kokomariah selaku KPM PKH yang status bantuannya diberhentikan oleh pemerintah daerah menyatakan, ialah :

*“Ya pas kemaren dapet mah alhamdulillah gitu ya dapet buat anak sekolah eh malah sekarang diberentiin bantuannya. Iya saya memanfaatkan bantuan PKH yang saya dapet pas dulu untuk pendidikan anak sekolah neng, emang saya fokusin buat anak sekolah bayaran SPP, ongkos, seragam, sepatu belum lagi buat beli kebutuhan sekolah lainnya yang kadang ada aja yang harus dibeli buat keperluan sekolah.”*

#### **4.2.2 Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pertemuan awal atau Validasi data dan Verifikasi Komitmen**

Peneliti dalam penelitian melakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data serta informasi terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH pada tahapan validasi data dan verifikasi komitmen di Kelurahan Kenanga Kota Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara faktor penghambat pada tahapan validasi data

sebagaimana pernyataan dari Pak Syapei selaku Koordinator PKH Kota Tangerang, ialah:

*“Kalo sekarang validasinya itu langsung dari PUSDATIN jadi pengecekan itu nanti tinggal jawab biasanya ada yang sudah pindah orangnya dan lainnya. Pedoman sekarang sudah tidak digunakan yang saya bilang itu dinamis lagi lagi mba berubah jadi sistem sekarang makenya bukan pedoman lagi, untuk pedoman pelaksanaan terbaru gak ada.”*

Hal serupa juga sebagaimana pernyataan dari Ibu Affita selaku pedamping PKH di kelurahan Kenanga, ialah :

*“Iya itu mba kalo faktor penghambat atau kendala sih karena sistem sekarang ini baru, banyak nama yang tidak sesuai ketika SP2D turun itu pas saat saya tanyakan ke ketua kelompok dan dipertemuan P2K2 mba ada yang sudah pindah juga ada yang gak diketahui alamatnya gak sesuai. Ya gitu mba sistem baru ini soalnya tiap bulan adanya usulan – usulan nama terus anggota baru penerima PKH, tapi kalo misalkan ada namanya gitu mba pasti saya cocokan lagi dengan keadaan terkini buat di Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) saya mba. Kan kebijakan pemerintah berubah – rubah ya mba Anggun semua bansos dan penerima itu ditentukan oleh pusat melalui SIKS-NG DTKS.”*

Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH pada tahapan verifikasi komitmen sebagaimana pernyataan dari Ibu Affita selaku pedamping PKH di kelurahan Kenanga sebagai berikut :

*“Kendala verifikasi komitmen ya ini kalo di kesehatan biasanya, anak – anak PKH gak rutin memeriksakan ke posyandu kayak hamil gitu diminta buat rutin ke posyandu, kelompok PKH juga kan juga banyak yang kader juga buat infoin ayo buat ke posyandu bayi, posyandu lansia kadang udah di woroh – woroh gitu juga susah buat dateng mba. Belom optimalnya jalur koordinasi maksudnya antara kita selaku program PKH pendamping dengan pihak – pihak yang ada gitu seperti pihak UPT puskesmas nya dan sekolahnya, kan masih sedikit pemahaman mereka tentang PKH ini dimana PKH itu harus rutin gitu kan kadang pihak PKH itu gak tau. “*

Selain itu ditambahkan juga oleh Ibu Affita, ialah :

*“Mindset KPM yang belum bisa mengelola perekonomian keluarga dengan baik mba.”*